

**LEGISLASI DALAM MASA *LAME DUCK SESSION*: IMPLIKASI BAGI  
STABILITAS POLITIK DAN HUKUM**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Adinda Mutiara Amalia Putri**

**NIM. 05020422022**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Mutiara Amalia Putri  
NIM : 05020422022  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Legislasi Dalam Masa *Lame Duck Session*:  
Implikasi Bagi Stabilitas Politik dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Surabaya, 02 Februari 2026  
Saya yang menyatakan,



**Adinda Mutiara Amalia Putri**  
NIM. 05020422022

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Adinda Mutiara Amalia Putri


NIM : 05020422022

Judul : Legislasi Dalam Masa *Lame Duck Session*: Implikasi bagi Stabilitas Politik dan Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 02 Februari 2026

Pembimbing,



Achmad Safiudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Adinda Mutiara Amalia Putri  
NIM. : 05020422022  
Judul : Legislasi Dalam Masa *Lame Duck Session*: Implikasi bagi Stabilitas Politik dan Hukum


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

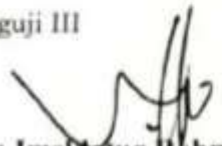
Penguji I

  
Achmad Safudin R., M.H.  
NIP. 199212292019031005

Penguji II

  
Dr. Lutfil Ansori, S.H., M.H.  
NIP. 198311132015031001

Penguji III

  
Elva Imeldatur Rohmah, M.H.  
NIP. 199204022020122018

Penguji IV

  
Hurri Hayati Alin, S.Hub.Int., M.H.  
NIP. 199106012025052003

Surabaya, 03 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

  
  
Dr. H. Saiful Musaffah, M.Ag  
NIP. 195303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adinda Mutiara Amalia Putri  
NIM : 05020422022  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
E-mail address : adindanutia944@mail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

LEGISLASI DALAM MASA *LAME DUCK SESSION*: IMPLIKASI BAGI

STABILITAS POLITIK DAN HUKUM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 April 2026

Penulis

( Adinda Mutiara Amalia Putri )

## ABSTRAK

Fenomena legislasi dalam masa *lame duck session* di Indonesia menjadi isu krusial karena sering kali memicu instabilitas politik dan hukum akibat minimnya akuntabilitas dan partisipasi publik. Latar belakang penelitian ini menyoroti durasi transisi kekuasaan di Indonesia yang cukup panjang, yakni sekitar 5-8 bulan, dimana anggota legislatif petahana tetap memiliki kekuasaan penuh untuk mengesahkan undang-undang meskipun mandat rakyat telah beralih melalui pemilu. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan untuk melakukan percepatan pengesahan regulasi kontroversial, yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melibatkan masyarakat yang bermakna. Berdasarkan konteks tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implikasi legislasi dalam masa *lame duck session* bagi stabilitas politik dan hukum di Indonesia? dan (2) Bagaimana tinjauan *Fiqh siyāsah* terhadap legislasi dalam masa *lame duck session*?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum (teori dan regulasi) menuju fakta-fakta hukum yang bersifat khusus terkait fenomena *lame duck session* di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislasi pada masa *lame duck session* berimplikasi negatif terhadap stabilitas politik dan hukum di Indonesia. Secara politik, fenomena ini memicu defisit akuntabilitas yang ekstrem dan memperuncing polarisasi horizontal antar-koalisi partai serta polarisasi vertikal antara elite lembaga legislatif dengan rakyat akibat pengabaian mandat terbaru pasca-pemilu. Secara hukum, produk legislasi pada periode ini mengalami cacat prosedur formal dan materiil karena melanggar asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang berujung pada banyaknya uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyah*, praktik legislasi yang tergesa-gesa dan tertutup ini melanggar prinsip *al-mas'ūliyyah* (akuntabilitas ganda kepada Allah dan rakyat), prinsip *shūrā* (musyawarah inklusif), dan prinsip *'adālah* (keadilan), karena lebih mengutamakan kemaslahatan kelompok (*maṣlaḥah khiṣṣah*) di atas kemaslahatan umum (*maṣlaḥah al-'āmmah*).

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan perlunya reformasi hukum untuk membatasi kewenangan legislasi DPR pada masa transisi. Pertama, merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, khususnya pada Pasal 76 ayat (4), untuk memperpendek masa transisi dengan menetapkan batas waktu pelantikan anggota DPR baru paling lambat 3 bulan setelah pengumuman hasil pemilu. Kedua, menambahkan pasal dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib yang memberikan persyaratan prosedural yang lebih luas, analisis dampak kebijakan yang komprehensif, serta larangan pengesahan RUU strategis yang belum mencapai kesepakatan tingkat I sebelum masa *lame duck session* dimulai.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Landasan Teori.....	15
H. Definisi Operasional.....	21
I. Metode Penelitian.....	24
<b>BAB II TINJAUAN TEORI <i>LAME DUCK SESSION</i> DAN PERSPEKTIF <i>SIYASAH DUSTŪRIYYAH</i></b> .....	<b>30</b>
A. Konsep <i>Lame Duck Session</i> .....	30
B. Prinsip <i>Checks and Balances</i> .....	34
C. Teori Legislasi.....	38
D. Teori Politik Hukum.....	46
E. Konsep <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	49

<b>BAB III IMPLIKASI LEGISLASI PADA MASA <i>LAME DUCK SESSION</i> TERHADAP STABILITAS POLITIK DAN HUKUM.....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Legislasi <i>Lame Duck Session</i> Berdasarkan Teori Politik Hukum.....	62
B. Implikasi Terhadap Stabilitas Politik .....	77
C. Implikasi terhadap Stabilitas Hukum dan Kualitas Regulasi .....	96
D. Upaya Menciptakan Stabilitas Politik dan Hukum Melalui Pembatasan Kewenangan Legislasi di Masa <i>Lame Duck Session</i> .....	117
<b>BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP LEGISLASI DALAM MASA <i>LAME DUCK SESSION</i>.....</b>	<b>130</b>
A. Legislasi <i>Lame Duck Session</i> dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i>	130
B. Analisis Prinsip <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> terhadap Praktik Legislasi Masa Transisi .....	133
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>144</b>
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>146</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>153</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>161</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Undang-Undang yang Dirampungkan DPR RI pada Masa <i>Lame Duck Session</i> Periode 2009–2014 (April–Oktober 2014) .....	64
Tabel 2. Undang-Undang yang Disahkan DPR RI pada Masa <i>Lame Duck Session</i> Periode 2014–2019 (April–Oktober 2019) .....	64
Tabel 3. Undang-Undang yang Disahkan DPR RI pada Masa <i>Lame Duck Session</i> Periode 2019–2024 (Februari–Oktober 2024) .....	65
Tabel 4. Lonjakan Aktivitas Legislasi di Akhir Masa Jabatan (2014-2024) .....	80
Tabel 5. Produk Legislasi Masa Transisi yang Diuji di Mahkamah Konstitusi ..	109



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### (i) Buku

- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*. Terj. Muhammad Bagir. Vol. 5. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1999.
- al-Syawkānī, Muhammad bin ‘Alī. *Fath Al-Qadīr al-Jāmi’ Bayna Fannay al-Riwāyah Wa al-Dirāyah Min ‘Ilm al-Tafsīr*. Jil. 3. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Tata Negara Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Shāṭibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī’ah*. Ji. 2. Dār Ibn ‘Affān.
- Ansori, Lutfil. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Raja Grafindo Persada, 2020. Depok.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. FH UII Press, 2004.
- Djazuli, H.A. *Fiqh siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- DPR RI. *Buku Memori Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019*. Jakarta Pusat, 2019.
- . *Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2023-2024*. Jakarta Pusat, 2024.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007.
- Intania, Christina Clarissa. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang*. 2024.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2016.
- Iqbal, Muhammad, and Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Jarīr al-Ṭabarī, Abu Ja‘far Muḥammad bin. *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Jil. 20. Kairo: Dār al-Hajr, 2001.
- Kastir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur’anil ‘Adzim*. Juz IV. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1988.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*. Terj. Jakarta: Logos, 2005.
- Mahfud M. D, Moh. *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, 2009.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
- Ma'lūf, Louwis. *Al-Munjid Fī al-Lughah Wa al-A'lām*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. 9th ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Ma'shum, Saifullah. *Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustashfa: Pokok-Pokok Hukum Islam, Terj. Saifullah Ma'shum*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Amani, 2017.
- Mawardi, Imam Al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah, 2020.
- Misbah, Muhammad. *Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Terj. Muhammad Misbah*. Jilid 1. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Munawwar, Rofi. *Ibn Taymiyyah, Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*. Terjemah Bahasa Indonesia. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh siyāsah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Qurtubi, Abu 'Abd Allah Muhammad b Ahmad al-. *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. 8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ridwan. *Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945*. n.d.
- Rifa'at, Muhammad. *Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat: Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Terj. Muhammad Rifa'at*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Samsu, La. *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyah*. no. 1 (2017).

Schedler, Andreas, Larry Jay Diamond, and Marc F. Plattner. *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. Lynne Rienner Publishers, 1999.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

'Umar bin Kaṭīr, Ismā'īl bin. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Jil. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

(ii) Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Amalia, Nanda. "Pembatasan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Di Masa Lame Duck Sebagai Manifestasi Pemerintahan Yang Demokratis." Undergraduate, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2024. <https://digilib.uinkhas.ac.id/34485/>.

Arsil, Fitra, Ariesy Tri Mauleny, and Ryan Muthiara Wasti. "Law Making Activities during Lame Duck Sessions in Indonesia (1997–2020)." *Parliamentary Affairs* 76, no. 2 (April 2023): 421–42. <https://doi.org/10.1093/pa/gsab058>.

Attamimi, A. Hamid S. *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV*. Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990.

Azhari, Virda Rahma, Innaya Salsabil Indira Kitri, and Rani Aldaba. "Analisis Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Keuangan Negara." *i-WIN Library*, 4.

Chandranegara, Ibnu Sina, and Luthfi Marfugah. "Regulatory Capture on Emergency Due Process of Law-Making." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 2024): 5. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2356382>.

Ermita, Yeni. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Terkait Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta." Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Frenki. "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi." *ASAS* Vol. 3 No. 2 (2023). <https://doi.org/10.24042/asas.v3i2.1662>.

Hudi, Wahyu Saman. *Analisis Hak Asasi Manusia Dan Fiqh siyāsah Terhadap Kepemimpinan Transgender*. Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

- Irwansyah, and Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* Vol. 2, no. No. 1 (2023): 70.
- Jenkins, Jeffery A., and Timothy P. Nokken. "Partisanship, the Electoral Connection, and Lame-Duck Sessions of Congress, 1877–2006." *The Journal of Politics* 70, no. 2 (April 2008): 450–65. <https://doi.org/10.1017/S0022381608080420>.
- Kartika, Shanti Dwi. "Kesepakatan KMP-KIH Dan Revisi Uu Md3." *Info Singkat Hukum* VI, no. 22/II/P3DI/November/2014 (2014).
- Kurnia, Elsa Cahya. *Tinjauan Fiqh Siyāsah atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Skripsi, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Muhammad, Raihan. "The Urgency of The Regulation of Legislative Power During The 'Lame Duck' Session to Optimize Constitutionalism." *Journal of Constitutional and Governance Studies* 1, no. 1 (June 2024): 38–61. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art3>.
- Munir, Misbahul. *Pembentukan Undang-Undang Selama "Lame Duck Session" Di Indonesia: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD Serta Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi. Depok: Universitas Indonesia, 2023.
- Nuryadin, Nuryadin. "Urgensi Pengaturan *Lame Duck Session* (Sesi Bebek Lumpuh) dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 6 (September 2022): 1797–814. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.26798>.
- Perdana, Muhammad Anugerah. "The Implications of the Implementation of Lawmaking During the Lame Duck Session for the President's Impartiality in the 2024 Election." *Journal of Constitutional and Governance Studies*, June 25, 2024, 96–110. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art6>.
- Prastyo, Angga, Samsul Wahidin, and Supriyadi Supriyadi. "Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11 (August 2020). <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4136>.
- Pratama, Dimas Wahyu, and Annisa Mayang Tyaningrum. "The Urgency of Regulating the Lame Duck Session in Indonesia on President Power." *International Journal of Social Science and Human Research* 07, no. 03 (March 2024). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i03-39>.

- Purawan, Akhmad Adi. "Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (December 2014): 347. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.30>.
- R, Achmad Safiudin, Jazim Hamidi, and Tunggul Anshari. "Urgensitas Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Fatwa Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (December 2018): 113–25. <https://doi.org/10.17977/um019v3i2p113-125>.
- Sagala, Hairun Tri Wahyuni. "Implikasi Periode *Lame Duck* Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat." Universitas Gadjah Mada, 2025. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/255116>.
- Sanur L, Debora, and Jeffrey Ivan Vincent. "Info Singkat: Implikasi Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara Terhadap Struktur Pemerintahan." *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI XVI*, no. 18/II/Pusaka/September/2024 (2024): 6–10.
- Sri Wahyuni, Rosmini Rosmini, and Alfian Alfian. "Analisis Dinamika Legislasi pada Periode *Lame Duck* dalam Kepemimpinan Politik di Indonesia." *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (November 2025): 11–25. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i4.2473>.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Al-Maqâshid Al-Syarî'ah: Teori dan Implementasi." *Sahaja* 2, no. 1 (May 2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.
- . "Al-Maqâshid Al-Syarî'ah: Teori dan Implementasi." *Sahaja* 2, no. 1 (May 2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.
- Sulistriani. "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Masa *Lame Duck Session* pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Positif dan *Siyasah Dusturiyah*." Skripsi, Curup: IAIN Curup, 2024. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/7506/1/Sulistriani.pdf>.
- Susilawati, Yani. "Penguatan Fungsi Partai Politik sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik pada Masa Pemilu 2024." *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 2, no. 2 (July 2023): 110–23. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i2.527>.
- Ulaan, Oksalin Girysvia, Dani Robert Pinasang, and Josepus J. Pinori. "Fungsi Legislasi dalam Periode *Lame Duck Session* dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Lex Privatum* 13, no. 4 (July

2024): 4.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56653>.

(iii) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 Dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, tanggal 31 Oktober 2018.

Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR RI/I/2023-2024 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024, tanggal 3 Oktober 2023.

Risalah Sidang Paripurna Masa Persidangan IV Rapat ke-31. 8 Juli 2014.

(iv) Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tanggal 29 September 2014.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-119-125-126-127-129-130-135/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tanggal 18 Februari 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 4 Mei 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanggal 3 Januari 2025.

(v) Majalah, Koran, dan Surat Kabar

Alie, Marzuki. *Buletin Parlemenaria Nomor: 834/IX/2014 DPR Akhirnya Sahkan Pilkada Melalui DPRD*. IV. Buletin Parlemenaria / September / 2014. Jakarta Pusat: DPR-RI, 2014. <https://berkas.dpr.go.id/pemberitaan/buletin-parlemenaria/b-834-9-2014.pdf>.

Amryudin, Anin Dhita Kiky. "Pembatalan Revisi Uu Pilkada dan Tindak Lanjut Pengaturannya." *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, no. Isu Sepekan (2024).

(vi) Data Elektronik

Adiputro, Arif. "Laporan Evaluasi Kinerja DPR Periode 2019-2024." *Indonesian Parliamentary Center*, January 6, 2025. <https://ipc.or.id/laporan-evaluasi-kinerja-dpr-periode-2019-2024/>.

ANT. "MK Sarankan Pemohon Cabut 'Gugatan' UU Pilkada." *hukumonline.com*. Accessed January 15, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-sarankan-pemohon-cabut-gugatan-uu-pilkada-lt543bfc03ee447/>.

Astuti, Dyah Dwi. "Naskah akademik revisi UU KPK disebut fiktif." *Antara News*, January 8, 2020. <https://www.antaraneews.com/berita/1241335/naskah-akademik-revisi-uu-kpk-disebut-fiktif>.